

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Non Government Organization (NGO) berperan penting sebagai ruang publik dimana sekelompok orang/organisasi/ komunitas dapat memenuhi kebutuhan pembangunan sosial yang tidak dapat dijawab dan dilakukan oleh negara dan pasar. Contohnya adalah NGO Anti-Slavery, NGO Anti-Slavery adalah NGO Internasional yang berbasis di Inggris, yang dibentuk pada tanggal 17 April 1839 oleh Thomas Clarkson, Thomas Fowell Buxton, dan abolisionist¹lainnya untuk berkampanye melawan perbudakan di seluruh dunia. Anti-Slavery adalah organisasi Hak Asasi Manusia internasional yang tertua di dunia. (Who we are, 2018) Anti-Slavery secara khusus menangani mengenai isu yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia, salah satunya adalah menangani kasus perbudakan dan eksploitasi pekerja anak. Sejak tahun 2012, Anti-Slavery telah berupaya untuk mengatasi eksploitasi pekerja anak dan jeratan hutang (Anti-Slavery menemukan bahwa 96% dari pekerjanya tidak diberikan gaji ataupun gaji mereka ditahan sehingga mereka terjebak dalam siklus hutang yang tidak pernah berakhir (Anti-Slavery, Impact Report; The difference you made in 2017)) di tempat pembakaran batu bata di daerah perbatasan di India bernama Punjab, dan telah diperluas jangkauannya untuk juga bekerja di Chhattisgarh dan Uttar Pradesh baik di tempat pembakaran batu bata dan sektor pertanian. (Anti-Slavery, Slavery in India's Brick Kilns & the Payment System, 2017).

¹ Abolisionist atau Abolisionisme adalah sebuah gerakan yang ingin menyingkirkan perbudakan di Eropa dan di Amerika. Gerakan ini aktif selama abad ke-18. Sampai abad ke-18, hanya sedikit orang yang mengkritik perbudakan.

Negara India adalah salah satu negara dengan Pekerja Anak Terbesar di Dunia, berdasarkan sensus nasional India. Pada tahun 2001, ada 12,6 juta pekerja anak dengan rentang usia 5 sampai 14 tahun yang dipekerjakan di India. Pada tahun 2011 jumlahnya turun menjadi 4,35 juta pekerja anak. Kantor The National Sample Survey telah melakukan survey dan menyebutkan jumlah pekerja anak menjadi 4,98 juta (Bureau, 2017). Sedangkan laporan International Labour Organization (ILO) pada tahun 2015 mengungkapkan sekitar 5,7 juta anak di India usia 5-17 tahun jadi pekerja. UNICEF memperkirakan jumlah yang jauh lebih tinggi yaitu mencapai 28 juta pekerja anak (Indian parliament passes contentious child labour bill, 2016). Dr Yuvraj Dilip Patil dalam tulisannya yang berjudul *Poverty and Child Labour in India: Socio-Legal Perspective* mengungkapkan bahwa perdagangan anak disebabkan oleh kemiskinan dan minimnya jaminan sosial. Dari 1 miliar lebih penduduk India, sekitar 300 juta hingga 400 juta penduduk berada di bawah garis kemiskinan (Debra, 2017) Anak-anak dalam keluarga miskin sulit mengakses pendidikan sehingga minim keterampilan. Akhirnya, mereka dijual atau dipekerjakan guna memperoleh sejumlah uang.

Dalam penelitian yang dilakukan NGO Anti-Slavery di India, terungkap bahwa ditemukannya 65-80% anak-anak berkisar antara usia 5 hingga 14 tahun yang tinggal di tempat pembakaran batu bata, dimana mereka sebenarnya tidak hanya tinggal di tempat itu namun mereka sambil bekerja. Mereka bukan hanya bekerja beberapa jam sehari namun rata-rata 7 jam per hari di musim dingin, dan 9 jam per hari di musim panas bahkan mereka tidak bersekolah sebagaimana seharusnya anak berumur 5 hingga 14 tahun. (India ratifies international child labour conventions, 2017).

Meskipun hal ini illegal menurut undang-undang di India, pemantauan dan implementasi dari undang-undang ini yang memastikan anak-anak untuk tetap bersekolah itu tidak diindahkan oleh Pemerintah di India. Dimana anak-anak ini terus bekerja tanpa bersekolah. Hal ini seringkali mengarah ke siklus eksploitasi tenaga kerja dan perbudakan. Dimana anak-anak tumbuh dengan pendidikan terbatas dan terpapar pada risiko lingkungan dan kesehatan untuk jangka waktu yang panjang, hal ini sangat membatasi peluang masa depan anak-anak tersebut. Aeshalla Khrisna, aktivis buruh di asosiasi kemanusiaan bernama Prayas mengatakan “*All of this is against the law, This is against the minimum wage act of 1948, the bonded labour act of 1976, the interstate migrant workers act of 1979. Child Labour. Sexual Harassment. Physical abuse. Its’ all happening. Every day.*”

Pada tanggal 13 Juni 2017, Pemerintah India menyerahkan instrumen kepada kantor perburuhan Internasional untuk meratifikasi Dua Konvensi *International Labour Organization* (ILO)² mengenai *Elimination of child labour, The Minimum Age Convention*, 1973 (No. 138) dan *the Worst Forms of Child Labour Convention*, 1999 (No. 182). Negara India adalah anggota negara ILO yang ke 170 yang meratifikasi Konvensi no.138. Dimana isi konvensi ini mengharuskan negara anggota untuk membatasi pekerja dibawah umum dimana tidak ada yang boleh diterima bekerja

² Satu-satunya badan tripartit Amerika Serikat, sejak tahun 1919, ILO mengumpulkan pemerintah, pengusaha, dan pekerja dari 187 negara anggota, untuk menetapkan standar ketenagakerjaan, mengembangkan kebijakan dan menyusun program yang mempromosikan pekerjaan layak bagi semua perempuan dan laki-laki.

atau bekerja di pekerjaan apapun kecuali untuk pekerjaan ringan dan pertunjukan artistik. India juga meratifikasi konvensi ILO No. 182 Yang terakhir ini menyerukan pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, termasuk perbudakan, kerja paksa dan perdagangan; penggunaan anak-anak dalam konflik bersenjata; penggunaan anak untuk prostitusi, pornografi dan kegiatan terlarang (seperti perdagangan narkoba); dan pekerjaan yang berbahaya. (India ratifies both fundamental ILO Conventions on Child Labour, 2017)

Untuk itulah, NGO Anti-Slavery sebagai organisasi Hak Asasi Manusia tertua di dunia dan isu eksploitasi pekerja anak ini sudah tidak asing di negara India, Anti-Slavery merasa harus mengambil peran yang setidaknya bisa mengurangi angka eksploitasi pekerja anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana upaya NGO Anti-Slavery movement dalam mendorong Pemerintah India meratifikasi konvensi International Child Labour Conventions?”

C. Landasan Teori

Landasan teori yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Konsep *Transnational Advocacy Network* (TAN)

Transnational Advocacy Network adalah jaringan kegiatan advokasi yang melibatkan aktivis dari dua atau lebih negara yang bekerja sama untuk mencapai tujuan atau membangun jaringan dengan aktivis dari negara lain. Advokasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pembelaan. Pembelaan disini berarti pembelaan atau bantuan terhadap seseorang yang mempunyai permasalahan.

Konsep *Transnational Advocacy Network* (TAN) menurut Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink dalam bukunya, *Activist Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics* adalah sebagai berikut:

“Transnational Advocacy Network (TAN) is defined as networks of activists, distinguishable largely by the centrality of principled ideas or values in motivating their formation. Besides, TAN is a World politics at the end of the twentieth century involves, alongside states, many non-state actors who interact with each other, with states, and with international organizations”.

TAN melakukan advokasi dalam isu yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, hak-hak perempuan dan lingkungan hidup. Dalam penulisan ini akan dibahas mengenai advokasi penegakan HAM yang dilakukan oleh Anti-Slavery atas kegagalan sistematis pada kebijakan pemerintah India dalam pekerja anak.

Strategi TAN dalam memobilisasi masyarakat dan menekan pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a) ***Information Politics***, yaitu upaya yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyediakan informasi bagi masyarakat serta membeberkan fakta melalui pernyataan-pernyataan dari para korban dan sebagainya hingga menarik perhatian masyarakat yang kemudian mampu menggerakkan masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap isu yang diperjuangkan. (Keck & Sikkink, 1999)
Melalui *Information Politics*, Anti-Slavery memobilisasi informasi terkait isu pekerja anak melalui publikasi terkait pertemuan antara para pekerja tempat pembuatan batu bata di Punjab.
- b) ***Symbolic Politics***, yaitu upaya yang dilakukan dengan symbolic yaitu mengadakan peringatan-peringatan aksi/kejadian, atau hari-hari istimewa yang terkait dengan isu yang diperjuangkan sehingga masyarakat memperhatikan isu tersebut. (Keck & Sikkink, 1999) (Keck & Sikkink, 1999)
- c) ***Leverage Politics***, upaya yang dilakukan untuk mengungkit/mengaitkan isu yang diperjuangkan tersebut sehingga mendapatkan perhatian dan dukungan dari actor yang memiliki kekuatan dan dapat memberikan pengaruh secara internasional terutama dalam bentuk perubahan kebijakan. Pengaruh yang dimaksud berupa pengaruh material (material leverage) merujuk pada kemampuan jaringan untuk mempengaruhi actor target melalui hal-hal material seperti bantuan ekonomi, militer,

serta hubungan diplomatic, maupun pengaruh moral (moral leverage). Pengaruh ini kemudian dijadikan landasan bagi jaringan untuk melibatkan actor yang lebih kuat agar dapat memberi pengaruh pada isu yang diperjuangkan (Keck & Sikkink, 1999) Melalui *Leverage Politics*, Anti-Slavery menghadiri konferensi perburuhan internasional yang ke 103 di Geneva. Dalam pidatonya, Aidan mengatakan kepada para delegasi yang hadir untuk mendesak para pemerintah untuk membuat peraturan yang pasti untuk menangani kasus kerja paksa di seluruh dunia. Ini adalah kesempatan Anti-Slavery untuk mendorong pemerintah di seluruh dunia untuk lebih memperhatikan lagi isu kerja paksa dan perbudakan ini.

- d) *Accountability Politics*, upaya yang dilakukan untuk selalu mengingatkan pemerintah dan actor lainnya agar mempertanggungjawabkan kebijakannya sesuai dengan nilai-nilai yang telah disepakati. Ketika actor yang ditargetkan telah berkomitmen untuk mempertanggungjawabkan kebijakannya sesuai dengan nilai-nilai yang telah disepakati, jaringan kemudian menggunakan posisinya untuk mengamati dan mengontrol jenjang antara janji actor dan praktiknya. Strategi ini dilakukan oleh jaringan agar tidak terjadi penyimpangan pada komitmen actor target (Keck & Sikkink, 1999). Aktor utama dalam jaringan advokasi adalah:

1. *Non-Governmental Organization* (NGO) ataupun *International Non Governmental Organization* (INGO);

2. Gerakan Sosial;
3. Yayasan;
4. Media;
5. Gereja, Serikat Buruh;
6. Organisasi Regional dan Internasional;
7. Pemerintah

Seperti yang sudah dijabarkan diatas, kasus yang terjadi di India ini tidak akan bisa terselesaikan jika hanya negara atau pemerintah saja yang menangani kasus ini mengingat besarnya angka pekerja anak di India dan ini sudah terjadi bertahun-tahun dan kasus ini masuk dalam isu kejahatan internasional dengan mengambil hak asasi manusia dengan mengeksploitasi mereka, memperdagangkan mereka. Oleh sebab itu muncul lah actor-aktor diluar negara seperti *Non Governmental Organization* (NGO) dan salah satu NGO yang menangani kasus ini di India yaitu Anti-Slavery, yang menangani kasus ini dengan penanganan advokasi dan campaign di berbagai kasus yang berkaitan dengan perbudakan. Upaya-upaya yang telah disebutkan diatas juga diterapkan oleh Anti-Slavery untuk mencapai tujuannya. Adapun Anti-Slavery menggunakan empat strategi yang ada dalam upaya Anti-Slavery melakukan pengembangan jaringan.

D. Hipotesa

Berdasarkan konsep yang digunakan oleh penulis untuk menjawab rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sementara mengenai upaya NGO Anti-Slavery movement dalam mendorong Pemerintah India meratifikasi konvensi internasional Child Labour Conventions adalah sebagai berikut:

1. Anti-Slavery menerapkan tipologi taktik dari *Transnational Advocacy Network* berupa *Information Politic*, seperti mengumpulkan data berupa informasi dari para korban eksploitasi pekerja anak di India.
2. Kedua, *Leverage Politic* dimana Anti-Slavery berupaya untuk mendapatkan perhatian dari aktor yang memiliki kekuatan dan contohnya negara dan pemerintah, Hal ini terbukti dari diratifikasinya dua konvensi inti utama tentang pekerja anak di *Internasional Labour Conference* di *Geneva*.

E. Metode Penelitian

Metodologi merupakan gambaran dari langkah-langkah yang digunakan oleh penulis dalam menjawab rumusan masalah dari apa yang menjadi obyek penelitian. Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis memutuskan untuk menggunakan metodologi penelitian kualitatif, menurut John W. Cresswell, penelitian kualitatif merupakan sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna (*meaning*) yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan pertanyaan dan prosedur yang akan muncul, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan peneliti kemudian memberikan interpretasi mengenai makna dari data yang diperoleh. Laporan akhir penelitian kualitatif memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapa pun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bersifat induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas sebuah situasi (Bakry, 2016) Sistematis pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan studi

literature yang berasal dari buku, jurnal, artikel, media cetak maupun digital dan literature lainnya sehingga penulis dapat menganalisis dan membahas mengenai “**Upaya NGO Anti-Slavery movement dalam mendorong Pemerintah India meratifikasi perjanjian Hukum Internasional di International Child Labour Conventions (2012-2017)**”.

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dalam sebuah penelitian sangat di perlukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan pembahasan, dan juga untuk membantu pembuktian terhadap argument penelitian dan pokok permasalahan yang telah ditentukan. Lebih jauh lagi, pembatasan dalam sebuah penelitian dimaksudkan agar objek penelitian lebih jelas dan spesifik, sehingga permasalahan dan kajian tidak keluar dari wacana yang telah ditetapkan.

Dalam Penelitian ini berfokus pada bagaimana proses Anti-Slavery sebagai salah satu Non-Governmental Organization di dunia dalam menangani kasus ini. Selanjutnya penelitian ini akan membuktikan bagaimana upaya Anti-Slavery dengan rekan-rekannya dapat memberikan pengaruh terhadap masyarakat, seperti kepekaan masyarakat akan isu tersebut dengan menggunakan strategi dalam teori TAN yaitu *Information Politics, Symbolic Politics, Leverage Politics, dan Accountability politics*.

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memberikan pemahaman mengenai isi dari penelitian secara menyeluruh, maka penulis membuat

sistematika penulisan ini akan dibagi kedalam lima bab dengan urutan sebagai berikut :

BAB I dalam penelitian ini, penulis akan membahas Latar Belakang Masalah, mengapa isu ini patut dikaji lagi, diteruskan dengan Rumusan Masalah, Landasan Teori yang akan digunakan, Hipotesa, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian, serta bagaimana sistematika penulisan.

BAB II Penulis membahas mengenai Keterlibatan organisasi internasional yaitu Anti-Slavery dalam suatu kasus dengan memaparkan latar belakang pembentukan, tugas, fungsi, dan struktural di dalamnya. pekerja anak.

BAB III berisi negara India dan menjelaskan kasus pekerja anak yang terjadi di India. Kemudian dalam bab ini juga akan di bahas mengenai kebijakan pemerintah India terhadap eksploitasi

BAB IV penulis menjelaskan bagaimana upaya Anti-Slavery dalam menegakan HAM terkait kasus eksploitasi pekerja anak dan pembuktian terhadap hipotesa melalui landasan teori *Transnational Advocacy Network* dengan data-data yang telah dikumpulkan.

BAB V, adalah kesimpulan yang berisi analisis pada bab-bab sebelumnya dan poin penting dari upaya Anti-Slavery dalam mengatasi kasus dalam penulisan ini. Bab lima menandakan berakhirnya tulisan ini